LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MADIUN

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N M A D I U N

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL.Raya Solo No.71 Jiwan Madiun 63121 Telp. (0351) 462787 / Fax. (0351) 4772992

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Guna mencapai kondisi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2021 yang meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menunjukkan arah yang ingin dicapai dalam periode tahun 2018 - 2023. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang menguraikan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. Dokumen tersebut juga berisi tentang indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2021, selain itu juga program kegiatan dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 dilakukan terhadap sasaran dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 sebagian besar sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun beberapa kekurangan pencapaian target yang belum terpenuhi perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan.

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras dari bidang penanggulangan bencana, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Upaya dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan khusunya bidang penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dan lintas sektor terkait dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.

Madiun, 25 Februari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN

MUHAMAD ZAHROWI, AP, MH
PembinaTingkat I
NIP. 19750819 199412 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dapat kami susun berkat limpahan rahmat dan hidayahNya dan oleh karena itu puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat umumnya dan dalam mencapai misi, tujuan Instansi Pemerintah khususnya agar tercipta penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aktualisasi dari semangat reformasi utamanya guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 telah melaksanakan Program Kegiatan Rutin maupun Program Kegiatan yang menyentuh langsung pada pelayanan masyarakat mendasar pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun yang sama.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagai media evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, juga untuk mengetahui capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian laporan kami, kritik dan saran guna memaksimalkan penyusunan Laporan maupun pelayanan kepada masyarakat tentunya kami harapkan.

Madiun, 25 Februari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN

MUHAMAD ZAHROWI, AP, MH
PembinaTingkat I
NIP. 19750819 199412 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang
B Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun
1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Struktur Organisasi
3. Sumberdaya Manusia (SDM)
C Isu – Isu Strategis
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A Rencana Strategis
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Indikator Kinerja
6. Program dan Kegiatan
B Penetapan Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A Capaian Kinerja
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran
B Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan penanggulangan bencana mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.

Sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 mempunyai tanggungjawab untuk :

a. Mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
b. Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah ;
c. Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana ;
d. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana.
e. Memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik :
   - Kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan serta keamanan dan keterlibatan masyarakat ;
   - Infrastruktur / fasilitas umum / sosial yang rusak akibat bencana.

B. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tanggal 8 Nopember 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun didalamnya memuat tugas dan fungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun utamanya Pasal 4 disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Adapun fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termuat di dalam pasal 5, sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisen ;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2. Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam kategori B yang mana Kepala Pelaksana dijabat dari Eselon III yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang dijabat secara rangkap (ex – officio) oleh Sekretaris Daerah.

Sedangkan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat
c. Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan ;
d. Seksi Kedaruratan Dan Logistik ;
e. Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Apabila digambarkan ke dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN

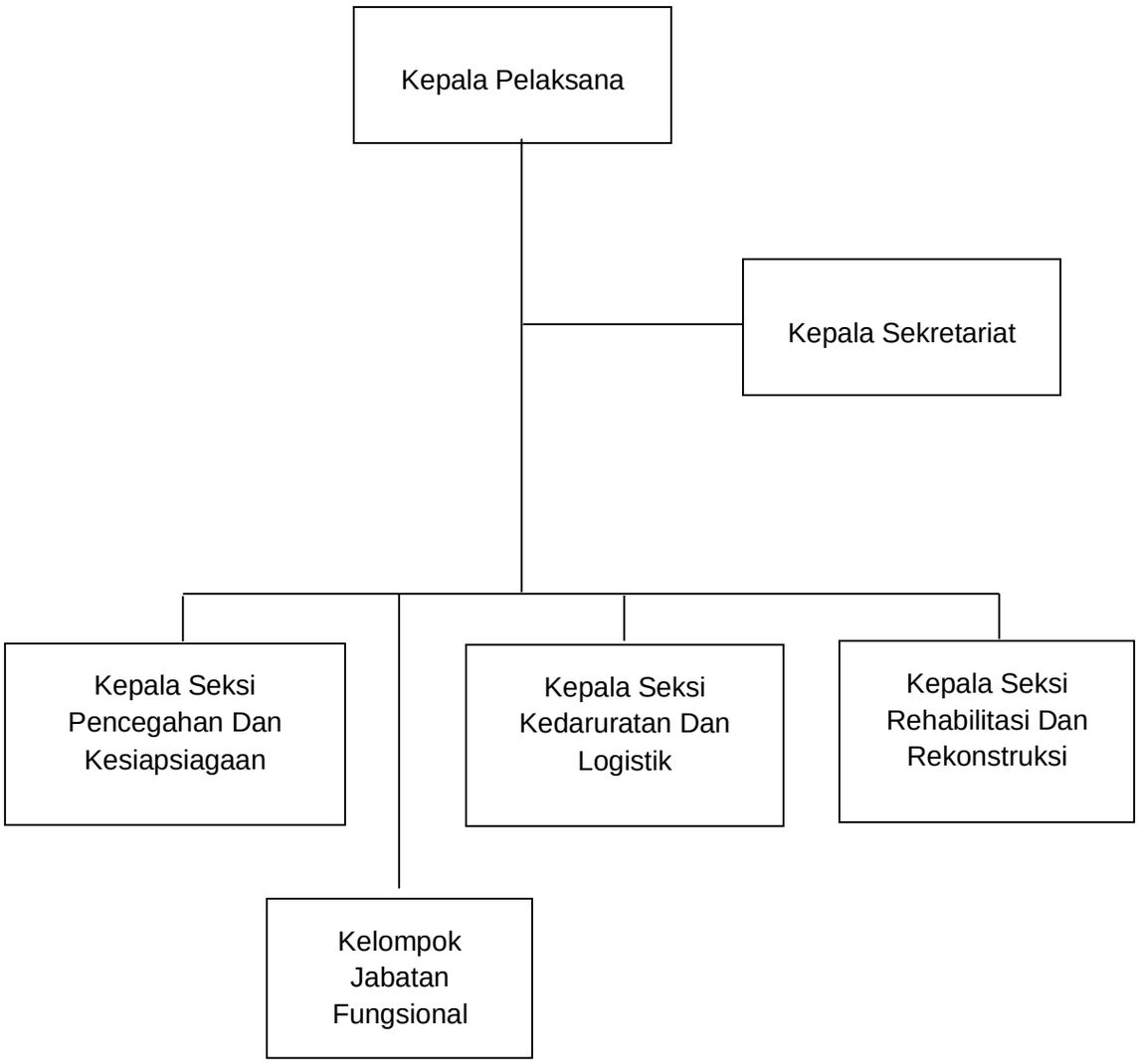

3. Sumberdaya Manusia (SDM)

Di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh faktor kondisi sumberdaya manusia yang secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 15 (lima belas) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

-	Kepala Pelaksana	=	1 orang, Eselon IIIA
-	Kepala Sekretariat	=	1 orang, Eselon IVA
➢	Staf	=	9 orang
-	Kepala Seksi Pencegahan & Kesiapsiagaan	=	1 orang, Eselon IVA
➢	Staf	=	1 orang
-	Kepala Seksi Kedaruratan Dan Logistik	=	1 orang, Eselon IVA
➢	Staf	=	1 orang
-	Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	=	1 orang, Eselon IVA
➢	Staf	=	- orang
	Jumlah	=	16 orang

a.2. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

-	SD	=	- orang
-	SLTP	=	1 orang
-	SLTA	=	5 orang
-	Sarmud / D3	=	1 orang
-	S1 (Strata I)	=	8 orang
-	S2 (Strata II)	=	1 orang
	Jumlah	=	16 orang

a.3. Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan

-	Golongan IV	=	1 orang
-	Golongan III	=	9 orang
-	Golongan II	=	5 orang
-	Golongan I	=	1 orang
-	Tenaga Kontrak	=	67 orang
	Jumlah	=	83 orang

a.4. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

-	Laki – laki	=	12 orang
-	Perempuan	=	4 orang
	Jumlah	=	16 orang

C. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain :

1 Rendahnya kesadaran atau mininmnya pengetahuan masyarakat tentang pentingya pencegahan dan penanggulangan becana;
2 Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
3 Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
4 Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana;
5 Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli geografi / geologi dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Penganggulangan Bencana Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknessis), peluang (Oportunitis) serta tantangan (Threats). Isu strategis yang akan diangkat :

1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan sinergitas antara BPBD Kabupaten Madiun sebagai koordinator penanggulangan bencana dengan berbagai pihak meliputi lintas OPD, Dunia Usaha, akademisi, media massa, relawan serta masyarakat (Penta Helix);
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pengurangan resiko bencana;
4. Pengembangan Sistem Teknologi dalam mendukung optimalisasi kinerja Penanggulangan Bencana;
5. Memasukan Pengurangan Risiko Bencana sebagai prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI dan MISI KEPALA DAERAH

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai peranan di dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023. Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun dengan tindakan kepedulian dan kemanusiaan melalui penanganan bencana alam.

Visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak “**. Makna dari visi

pembangunan Kabupaten Madiun tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya, politik maupun gangguan ketertiban umum dan bencana, terwujud kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, terwujud kesejahteraan yang berkeadilan serta terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya yang berpedoman pada kearifan lokal dan niai – nilai luhur budaya.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

- Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai peranan di dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah khususnya pada Misi ke 3 “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan” yaitu dengan mendukung percepatan target kinerja penanggulangan bencana dalam rangka penguatan daya saing daerah Kabupaten Madiun.

2. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari pernyataan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan visi dan khususnya misi Bupati Madiun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tujuan yaitu **"Meningkatkan ketahanan bencana daerah"**.

3. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, ditetapkan sasaran dan indikator yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yaitu **"Meningkatnya Kapasitas Daerah"**.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGHITUNGAN
Meningkatnya Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	IKD merupakan unsur pembentuk nilai IRB yang berupa Kapasitas (Capcity)

4. INDIKATOR KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama Kabupaten Madiun dan Target 2021

TUJUAN : Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah			
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kapasitas Daerah			
No	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target 2020**
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,26

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. BPBD menetapkan program programnya sesuai RPJMD periode 2018 – 2023 yaitu :

Program Utama (Teknis)

1. Proram Penanggulangan Bencana.

   Program ini merupakan program utama yang mencakup tiga fase utama dalam penanggulangan bencana yaitu mulai fase pra bencana, saat kejadian bencana hingga fase setelah (pasca) bencana, sehingga program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas utama BPBD. Program ini meliputi kegiatan yaitu :

   a) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,

      dengan sub kegiatan :

      - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
      - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota
      - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

   b) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

      dengan sub kegiatan :

      - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Program Penunjang

2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan. Penetapan Kinerja sangat penting untuk dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan program atau kegiatan instansi akan lebih baik, dalam mencapai visi dan misi Bupati.

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Madiun tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagaimana terlampir di Lampiran I.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas maupun pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban tersebut yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis. Di dalam bab ini dijabarkan pencapaian kinerja masing-masing sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021.

Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100	Tidak Tercapai Target	

A. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemda Kabupaten Madiun untuk tahun 2021. Pencapaian Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap 2023 (%)
			Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja %		
	Meningkatnya Kapasitas Daerah						
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,26	0,26	0,39	150%	0,4	97,5%

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka mengungkap dan menguraikan seberapa jauh suatu rencana atau taget kinerja dapat dicapai, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Bagian ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja yang menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis.

Sasaran : *Meningkatnya Kapasitas Daerah*

Peningkatan kapasitas daerah merupakan kunci untuk menurunkan resiko yang ditimbulkan akibat dampak kejadian bencana. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menjadikan peningkatan kapasitas sebagai sasaran strategis/utama. Untuk meminimalkan jumlah kerugian yang dapat disebabkan oleh kejadian bencana baik berupa tingkat kerugian, kerusakan maupun jumlah korban jiwa. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan mulai dari tahap pra bencana, saat darurat bencana dan pasca bencana yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penanggulangan Bencana

1) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaa meliputi berbagai upaya mitigasi yang dilakukan dalam tahap pra bencana untuk meminimalisir risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini terdiri atas beberapa sub kegiatan yaitu Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dan

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100%. Laporan kejadian yang masuk segera ditindak lanjuti dengan pengecekan lokasi dan melakukan assesment atau kaji cepat kondisi tanggap darurat, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat setempat, dinas terkait, polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama menangani bencana. Pada Tahun 2021 terdapat 99 kejadian yang ditangani oleh BPBD Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Kejadian Tahun 2021 Kabupaten Madiun

NO	LOKASI BENCANA	2021					
		BANJIR	TANAH LONGSOR	ANGIN PUTING BELIUNG	KEBAKARAN	TANGGUL JEBOL	POHON TUMBANG
1	Kebonsari						
2	Geger	1			1		
3	Dolopo	2		1			
4	Dagangan	2	4	3			
5	Wungu	4		1		1	
6	Kare		2	1			
7	Gemarang	3	3				
8	Saradan	10	2	4			1
9	Pilangkenceng	9		2		1	1
10	Mejayan	3			1		
11	Wonoasri	5		4			
12	Balerejo	5		1		1	
13	Madiun	3		6			
14	Sawahan			4			
15	Jiwan	1		4	3		
JUMLAH		**48**	**10**	**31**	**5**	**3**	**2**

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

  Sub kegiatan ini memiliki indikator Persentase sarana prasarana kesiapsiagaan yang tersedia dengan capaian 0% karena pada tahun 2021 tidak melakukan pengadaan sarana prasarana kesiapsiagaan melainkan diperoleh melalui bantuan / hibah dari instansi vertikal baik provinsi maupun BNPB seperti alat

peringatan dini (*Early Warning System)* untuk Banjir di 2 lokasi yaitu Desa Klumutan, Kec. Saradan dan Desa Kedungrejo, Kec. Pilangkenceng. Disamping pemenuhan sarana prasarana kesiapsiagaan, sub kegiatan ini juga meliputi pelaksanaan piket siaga darurat bencana yang dilakukan dengan melaksanakan pemantauan dalam rangka antisipasi bencana yaitu terbentuknya kelompok/regu piket yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalop (Pusat Pengendali dan Operasional) Penanggulangan Bencana, dengan adanya kegiatan rutin piket penjagaan posko selama 24 jam penuh sejak bulan Januari hingga Desember, serta khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat puncak musim hujan, pada saat libur hari raya, tahun baru, dan even tertentu.

- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

  Sub kegiatan ini memiliki indikator persentase pemulihan kerusakan akibat bencana dengan capaian 0% dikarenakan anggaran yang terpasang untuk mencukupi syarat salur dana hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dari pusat, sedangkan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022. Sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3) terdapat 3 paket kegiatan pembangunan yaitu Jembatan Luworo di Desa Luworo Kec. Pilangkenceng, Penahan Tebing Kali Piring Desa Garon (Sal. Pas Gading Balerejo) Kec. Balerejo, serta Penahan Tebing Kali Sono Desa Garon (B. Pas. Garon Balerejo) Kec. Balerejo.

- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

  Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana dengan capaian 100% yaitu 700 orang peserta gladi. Pada tahun 2021 pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan sebanyak 2 kali yaitu dalam rangka penanaman tanaman vetiver penahan longsor yakni Akar Wangi di Desa Cermo Kec. Kare dan di Desa Durenan Kec. Gemarang, serta gelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan di Wana Wisata Pancur Pitu Desa Sumberbendo Kec. Saradan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh

Bupati Madiun dan melibatkan forkopimda, OPD terkait serta LSM Penggiat Sosial dan kebencanaan dengan tujuan mengecek kesiapan peralatan dan logistik kebencanaan dari multisektor untuk penanganan kebencanaan.

2) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu jumlah desa tangguh yang aktif dengan sub kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota. Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk pada tahun 2021 yaitu sebanyak 6 desa, dimana 4 desa diantaranya dibentuk secara mandiri oleh desa tersebut dengan didampingi langsung oleh BPBD Kabupaten Madiun sedangkan 2 desa lainnya oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Berikut daftar desa tangguh bencana yang terbentuk tahun 2021 :

No	Kecamatan	Desa	Jenis Ancaman
1	Wungu	Bantengan	Banjir
2	Kare	Bolo	Longsor
3		Morang	Longsor
4	Saradan	Klumutan (APBD Prov. Jatim)	Banjir
5	Pilangkenceng	Purworejo (APBD Prov. Jatim)	Banjir
6	Mejayan	Ngampel	Banjir

- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini mewadahi perhitungan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Madiun yang merupakan indikator sasaran strategis daerah sehingga harus menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Nilai Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 Kabupaten Madiun berdasarkan hasil perhitungan yaitu 162 dengan masuk kategori tinggi. Sedangkan hasil perhitungan secara nasional memiliki nilai 153,86 dan termasuk dalam kategori tinggi. Tingginya nilai IRB disebabkan oleh banyak faktor dan yang paling signifikan adalah rendahnya nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Madiun. Beberapa prioritas yang dapat menunrunkan nilai IRB yaitu:

a) Perkuat Kebijakan dan Kelembagaan;
b) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
c) Pengembangan Sistem Informasi Diklat dan Logistik;
d) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;

e) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
f) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
g) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas Daerah adalah 150% dengan predikat sangat baik dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Madiun Tahun 2021 yaitu dengan skor 0,39 sedangkan nilai target adalah 0,26. Namun nilai IKD Kabupaten Madiun masih tergolong dalam kategori rendah, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	IKD	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,45	0,39	RENDAH
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,37		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,50		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,51		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,33		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,37		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,35		

❖ **Faktor Pendukung Keberhasilan :**

- Tingkat kesadaran akan pentingnya penanganan bencana pada relawan/masyarakat cukup tinggi
- Peran Koordinasi dan sinergitas dari 5 aspek penteheliks dalam penanggulangan mulai meningkat walau belum optimal
- Dukungan anggaran dan partisipasi yang tinggi dari pemerintah desa dan provinsi

❖ **Permasalahan :**

- Adanya prioritas anggaran untuk penanganan Pandemi Covid – 19, sehingga anggaran APBD pada BPBD Kabupate Madiun masih kurang optimal mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana.
- Pemahaman OPD megenai konsep IKD masih sangat terbatas dan masih ada ego sektoral.
- Masih kurangnya komitmen daerah terhadap pencapaian SPM sub Urusan Bencana sebagai prioritas utama sehingga masih minimnya dukungan anggaran

❖ **Strategi Pemecahan Masalah :**

- BPBD semakin meningkatkan koordinasi dan inisiasi untuk mengenalkan Penanggulangan Bencana kepada seluruh stakeholder, dunia usaha dan media masa.
- Meningkatkan peran mereka dalam upaya penanggulangan bencana.
- Membangkitkan semangat peduli bencana kepada masyarakat maupun pemerintah desa melalui berbagai kegiatan salah satunya melalui desa tangguh bencana.
- Untuk peningkatan pemahaman mengenai konsep penurunan risiko bencana BPBD bekerjasama dengan konsultan untuk menyusun dokumen kebencanaan dan konsep perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

❖ **Rencana Tindak Lanjut :**

- Melanjutkan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana di desa rawan bencana lainnya dengan meningkatkan pratisipasi desa.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergisme pentahelix sehingga dapat bersama sama bersinergi menanggulangi bencana secara optimal.
- Memprioritaskan kegiatan - kegiatan yang merupakan capaian SPM dalam perencanaan tahun berikutnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Program Penanggulangan Bencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.362.441.943,- terealisasi sebesar Rp. 988.536.365,- atau 4,23%. Program ini terdiri atas Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.306.891.943,- terealisasi Rp. 933.041.365,- atau 4% , serta Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan jumlah anggaran Rp. 55.550.000,- terealissi Rp. 55.495.000,- atau 100%. Sedangkan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki anggaran sebesar Rp. 2.242.027.910,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.208.928.666,- atau 100%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
BELANJA	**25.604.469.853,00**	**3.196.246.221,00**	**12,48**
BELANJA OPERASI	**3.481.700.432,00**	**3.159.936.221,00**	**90,76**
Belanja Pegawai	1.322.804.733,00	1.308.696.803,00	98,93
Belanja Barang dan Jasa	2.158.895.699,00	1.851.239.418,00	85,75
BELANJA MODAL	**22.122.769.421,00**	**36.310.000,00**	**0,16**
Belanja Peralatan dan Mesin	36.769.421,00	36.310.000,00	98,75
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.086.000.000,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**(25.604.469.853,00)**	**(3.196.246.221,00)**	**12,48**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(25.604.469.853,00)**	**(3.196.246.221,00)**	**12,48**

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	% Capaian Anggaran	EFISIENSI
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,26	0,39	150%	23.362.441.943	988.536.365	4,23%	145,77%

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	% Capaian Anggaran	EFISIENSI
A.	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk	36,4%	(17 desa/44 desa)x100% = 38,63%	106,12%	23.362.441.943	988.536.365	4,23%	
		2. persentase korban terdampak bencana yang ditangani	100%	100%	100%				
		3. persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100%	0%	0%				
1.	Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	23.306.891.943	933.041.365	4%	96%
1.1.	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kesiapsiagaan yang tersedia	100%	0%	0%	633.179.880	573.689.032	90,60%	-90,60%

1.2.	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana	100%	0%	0%	22.633.840.063	319.487.333	1,41%	-1,41%
1.3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	700 orang	700 orang	100%	39.872.000	39.865.000	99,98%	0,02%
2.	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah desa Tangguh bencana yang aktif	8 desa	17 desa	212,5%	55.550.000	55.495.000	99,90%	112,6%
2.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebencanaan yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	100%	55.550.000	55.495.000	99,90%	0,1%
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	80,01 77	80,04 78,86	100,04% 102%	919.223.177	900.231.863	97,93%	2,07%
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terenuhi	100%	98,93%	98,93%	1.322.804.733	1.322.804.733	98,93%	0%
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN selama setahun	100%	98,93%	98,93%	1.322.804.733	1.322.804.733	98,93%	0%
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terenuhi	100%	99,75%	99,75%	98.750.850	98.500.000	99,75%	0%
2.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pakaian Dinas yang Terpenuhi	100%	99,75%	99,75%	98.750.850	98.500.000	99,75%	0%
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terenuhi	100%	100%	100%	191.583.033	192.270.224	100,36%	0%
3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	3.215.465	3.215.465	100%	0%

3.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	100%	98,75%	98,75%	36.768.655	36.310.000	98,75%	0%
3.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	6.102.635	6.102.635	100%	0%
3.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	100%	99,34%	99,34%	67.956.288	67.507.474	99,34%	0%
3.5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	12.992.990	12.992.990	100%	0%
3.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undanngan	100%	97,44%	97,44%	4.680.000	4.560.000	97,44%	0%
3.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	59.867.000	60.845.000	100%	0%
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100%	93,77%	93,77%	301.023.836	282.276.405	93,77%	0%
4.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan pengiriman surat yang terpenuhi	100%	17,33%	17,33%	600.000	104.000	17,33%	0%
4.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	71.098.836	71.097.405	100%	0%
4.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	92,04%	92,04%	229.325.000	211.075.000	92,04%	0%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	100%	99,79%	99,79%	327.865.458	327.185.234	99,79%	0%
5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	99,86%	99,86%	279.315.765	278.923.334	99,86%	0%
5.2	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebelair	100%	99,52%	99,52%	2.090.000	2.080.000	99,52%	0%

5.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin yang terpelihara	100%	99,87%	99,87%	22.511.148	22.481.900	99,87%	0%
5.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100%	98,96%	98,96%	23.948.545	23.700.000	98,96%	0%

Tingkat efisiensi kinerja BPBD Kabupaten Madiun seperti digambarkan pada tabel di atas. Sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) memiliki tingkat efisiensi yang tinggi hingga melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 145,77%, dimana secara penyerapan anggaran rendah sebab anggaran ada sub kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota beum bisa terealisasi karena merupakan syarat salur anggaran hibah dari pemerintah pusat sedangan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Namun secara capaian kinerja indikator IKD telah melebihi target yang ditentukan. Sedangkan untuk sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota memiliki tingkat efisiensi yang bernilai negative sebab dalam pelaksanaannya belum dapat mencapai target indicator yaitu persentase sarana prasarana kesiapsiagaan yang tersedia 0% sedangkan penyerapan anggaran tinggi yaitu untuk pemenuhan kebutuhan opersional piket siaga darurat bencana. Pada kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana memiliki tingkat efisiensi yang tinggi karena dengan ketersediaan anggaran tersebut, capaian indikatornya dapat melebihi target yaitu terdapat 17 desa Tangguh yang aktif dari 8 desa yang ditargetkan. Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki tingkat ketercapaian yang seimbang antara target indikator dengan capaian realisasi anggarannya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 disusun sebagai wujud komitmen dalam upaya melaksanakan pembangunan di bidang Kebencanaan menuju pada tata kepemerintahan yang baik atau *Good Governance*. LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 ini merupakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023. Program Dan Kegiatan yang telah dilaksanakan mengarah pada pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Madiun maupun Renstra BPBD Kabupaten Madiun sesuai dengan Misi dan tujuan yang hendak dicapai. Meskipun sebagian besar sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun beberapa kekurangan pencapaian target yang belum terpenuhi perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Madiun yang kami susun dengan harapan untuk tahun berikutnya lebih baik dan bermanfaat bagi pelayanan masyarakat utamanya dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bahaya terhadap bencana.

LAMPIRAN